

HEGEMONI POLITIK FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2020

(Studi Perbandingan Kota Semarang & Kabupaten Boyolali)

Arioseno Dwi Pradana
(Arioseno2000@gmail.com)
Dr. Nur Hidayat Sardini.,S.Sos., M.Si.
(nhsardini@gmail.com)
Hendra Try Ardianto, S.I.P.,M.A.
(htardianto2live.undip.ac.id)

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pilkada yang terjadi di Indonesia terdapat beberapa tantangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Salah satu problematika tersebut yaitu penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal. Fenomena calon tunggal bermula pada tahun 2015, dengan terdapatnya tiga daerah hanya terdapat satu pasangan calon yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada. Atas dasar problematika tersebut, terdapat landasan hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 yang berisi tentang penyelenggaraan Pilkada calon Tunggal. Pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali juga menyelenggarakan Pilkada dengan calon tunggal. Peneliti memilih kedua daerah tersebut, untuk dijadikan studi perbandingan terkait penyebab terjadinya Pilkada dengan calon tunggal melihat dari segi perspektif hegemoni politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model studi perbandingan, dimana dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian calon tunggal pada penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2020 yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali berlandaskan dengan metode ilmiah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapatnya suatu kajian mengenai perbedaan dan persamaan dari penyebab terjadinya Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali ditinjau dari segi perspektif hegemoni politik.

Kata Kunci: calon tunggal; Pilkada; penyelenggaraan.

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengacu dari terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu). Urgensi penyelenggaraan pemilu yang menjadi suatu komponen penting implementasi negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu juga merupakan salah satu

pilar dalam proses pelaksanaan akumulasi kehendak dari masyarakat. Pemilu juga merupakan gambaran umum pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia. Pemilu menjadi tahap paling awal dari rangkaian tatanan negara yang demokratis. Menurut (Sardini, 2011) Pemilu adalah salah satu pilar

utama dari suatu proses pengumpulan tujuan masyarakat sekaligus proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Hal inilah yang menyebabkan demokrasi, dikarenakan pemilu merupakan suatu mekanisme terkait pendelegasian dari wujud kedaulatan rakyat terhadap penyelenggara negara. Pemilu juga merupakan suatu prosedur dalam pemindahan pertentangan kepentingan dan aspirasi masyarakat ke dalam lembaga penyelenggaraan negara. Selain itu, Pemilu juga sebagai suatu mekanisme untuk upaya perubahan-perubahan politik secara periodik, baik melalui proses sirkulasi dan elit politik maupun perubahan yang bertujuan pada pola dan arah pembuatan kebijakan publik (Fitriyah, 2013).

Penyelenggaraan Pilkada yang terjadi di Indonesia terdapat beberapa tantangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Salah satu problematika tersebut yaitu pencalonan pasangan yang akan mendaftarkan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Fenomena calon tunggal dalam penyelenggaraan Pilkada serentak mewarnai suhu politik di Indonesia. Hal ini bermula pada tahun 2015 dengan terdapatnya tiga daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada. Munculnya fenomena ini disebabkan karena kurangnya partisipasi

partai politik untuk mengajukan kader-kader terbaik dari masing-masing partai, sehingga berpengaruh terhadap terjadinya liberalisasi politik untuk memenangkan pasangan calon tunggal saja. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Yunus pada tahun 2018 disampaikan mengenai munculnya fenomena calon tunggal juga menjadikan adanya landasan hukum dari adanya problematika tersebut yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi N0. 100 PUU XIII 2015 yang menentukan mekanisme baru dalam pelaksanaan pilkada serentak, yaitu dengan memberikan peluang bagi satu pasangan calon kepala daerah, baik gubernur/ wakil gubernur, walikota/ wakil walikota dan bupati/ wakil bupati untuk mengikuti kontestasi pilkada serentak melalui mekanisme memilih setuju atau tidak setuju (Yunus, 2018).

Penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal pada tahun 2020 juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah, total terdapat 6 daerah yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal. Hal ini terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali yang menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal. Dua daerah tersebut dalam hasil yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada tahun 2020 memiliki keunikan masing-masing. Mengenai penyelenggaraan Pilkada di kedua

tempat tersebut juga terdapat unsur kesamaan yang terjadi yaitu dari pasangan calon tunggal dari kedua daerah tersebut memiliki paai pengusung utama yang sama. Kemudian juga adanya faktor kekuatan petahana yang juga menjadi hal yang menarik untuk diteliti mengenai pengaruhnya dalam penyelenggaraan Pilkada di wilayah tersebut. Faktor kekuatan petahana tersebut seperti yang terjadi pada pasangan calon walikota dan wakil walikota yang saat ini telah resmi terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang yaitu Hendar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti, atau yang akrab disebut dengan pasangan (Hendi-Ita) yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selaku partai pengusung utama dalam penyelenggaraan pilkada yang terjadi di Kota Semarang dan juga di Kabupaten Boyolali. Dominasi dari partai PDI-P juga terlihat di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tercatat enam daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal dari calon kepala daerah semuanya merupakan kader dari partai dengan logo kepala banteng tersebut.

Penyelenggaran Pilkada yang terjadi di Kota Semarang telah terlaksana dengan menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2020 yaitu, H. Hendar

Prihadi Alias Hendi, S.E., MM dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M. Sos. Dengan gabungan partai politik pengusung yaitu Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indoensia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. Menurut informasi resmi yang terdapat pada *website* Kpu Kota Semarang, pasangan tersebut memperoleh suara sah sebanyak 716.693 suara atau 91,56 % dari total suara sah. Sementara untuk penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Boyolali juga telah selesai dilaksanakan dengan pasangan terpilih yaitu M. Said Hidayat dan Wahyu Irawan dengan memperoleh suara sah sebanyak 666.956 suara atau sebesar 95.60 %. Terpilihnya Said sebagai Bupati Boyolali juga mendapat suatu atensi dari masyarakat dikarenakan posisinya sebelumnya menjadi Wakil Bupati Boyolali. Pasangan Said–Wahyu dalam pecalonannya mendapatkan dukungan dari Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Keadilan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra. Melihat dari hasil rekapitulasi suara yang terdapat pada kedua daerah tersebut menggambarkan kekuatan dukungan yang sangat tinggi terhadap pasangan calon tunggal dalam

penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yang terjadi pada kedua wilayah tersebut. Terkait dari hasil yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada di kedua tersebut, menjadikan suatu penelitian ini menarik untuk digali informasinya dalam proses terjadinya calon tunggal di kedua daerah tersebut.

Problematika terkait adanya fenomena calon tunggal dalam penyelenggaraan pilkada dalam penelitian terdahulu juga diteliti oleh Lili Romli pada tahun 2018, penelitian tersebut berjudul Pilkada langsung, calon tunggal dan masa depan demokrasi lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Lili Romli tersebut disampaikan bahwa seharusnya dalam hal ini partai politik lainnya mempunyai kader yang dapat diusung dalam penyelenggaraan pilkada tersebut. Namun, situasi yang terjadi berkebalikan, dengan tidak adanya kaderisasi partai politik yang menjadi penantang dalam persaingan penyelenggaraan pilkada tersebut. Dampak yang terjadi secara otomatis, dengan adanya kemudahan calon tunggal tersebut dalam memenangkan pada penyelenggaraan pilkada tersebut. Faktor penyebab lainnya juga yang menyebabkan suatu daerah terdapat pasangan dengan calon tunggal yaitu faktor rendahnya pendidikan politik terhadap masyarakat, yang dalam hal ini berpengaruh pada wadah aspirasi untuk

memilih kotak kosong. Terkait terdapatnya beberapa faktor yang menjadi penyebab lahirnya pilkada dengan calon tunggal juga memunculkan situasi yang berdampak pada mematikan demokrasi melalui Pemilu lokal yang tidak mengenal adanya persaingan yang sengit dan kompetitif dalam kontestasi pencalonan penyelenggaraan pilkada tersebut (Romli, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang terjadi terkait munculnya hegemoni politik fenomena lahirnya calon tunggal pada penyelenggaraan pilkada pada tahun 2020 yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali tersebut, menjadikan penelitian ini menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan adanya keunikan yang terjadi dalam penyebab dan faktor-faktor lahirnya pasangan calon tunggal di kedua daerah tersebut, kemudian juga mengenai proses dan hasil dari penyelenggaraan pilkada di kedua wilayah tersebut. Studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran fakta di lapangan mengenai perbandingan Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali tahun 2020 ditinjau dari perspektif hegemoni politik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Menurut (Cresswell,2009) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat spesifik dengan mengamati subjek yang terdapat dalam lingkungan tersebut, baik saat berinteraksi dengan informan maupun menafsirkan pendapat informan tentang kondisi lingkungan sekitarnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretatif, yang di dalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan para partisipan. proposal penelitian melalui pendekatan secara deskriptif –analitik, dengan bertujuan dimaksudkan untuk menggali informasi tentang fenomena utama (*central phenomenon*). Pelaksanaan penelitian ini juga bertujuan guna mencari data – data melalui teknik triangulasi (gabungan), analisis dan dalam hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pendalaman makna daripada generalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model studi perbandingan, dimana dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian calon tunggal pada penyelenggaraan pilkada pada tahun 2020 yang terjadi di Kota Semarang dan

Kabupaten Boyolali berlandaskan dengan metode ilmiah.

Informan dalam penelitian ini merupakan para perwakilan partai politik, lembaga swadya masyarakat dan Instansi terkait yang berkaitan secara langsung dalam penelitian pilkada calon tunggal yang terdapat di kedua wilayah tersebut. Informan memahami betul mengenai proses penyebab terjadinya dan penyelenggaraan pilkada calon tunggal pada tahun 2020 di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali. Informan yang terdapat pada penelitian skripsi ini sejumlah 9 orang yang meliputi perwakilan partai politik, lembaga swadya masyarakat, KPU yang terdapat di kedua daerah tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan perwakilan pemilih dari masyarakat daerah tersebut.

Berdasarkan referensi dari studi literatur oleh Miles & Huberman dalam Hardani dkk (2020), terdapat 3 sistematika dalam aktivitas analisis data, yaitu diantaranya, merduksi, menyajikan, dan penarikan kesimpulan. Hal ini bertujuan dalam pengumpulan data dapat terlaksana secara linier dan juga dapat terbentuk kekuatan pembangunan yang teranalisa secara general.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pilkada calon tunggal yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali memiliki perbedaan dan persamaan melihat dari faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut. Dari penjelasan yang disampaikan pada pernyataannya sebelumnya, terdapat persamaan dari penyebab terjadinya fenomena pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali, yaitu terletak pada pengaruh regulasi terselenggaranya penyelenggaraan Pilkada calon tunggal. Selain itu faktor figur politik dan biaya politik juga menjadi pengaruh pada terjadinya fenomena tersebut. Mengenai perbedaan terkait terjadinya Pilkada calon tunggal yang terdapat di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali terdapat pada faktor pendidikan politik dan juga terkait langkah komunikasi politik yang dibangun. Faktor-faktor dari penyebab terjadinya fenomena tersebut, juga sebagai langkah untuk mengidentifikasi terkait hegemoni politik yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali.

Penyelenggaraan Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali melihat dari segi perspektif hegemoni politik, terdapat perbedaan yang terjadi, hal ini juga

ditegaskan oleh para informan yang menyampaikan mengenai keterkaitan hegemoni politik dengan fenomena yang terjadi. Pilkada calon tunggal di Kota Semarang, dari hasil penelitian yang terjadi di lapangan juga dari data sekunder yang didapatkan, faktor kuat yang menyebabkan terjadinya Pilkada calon tunggal karena faktor kinerja petahana. Langkah yang dilakukan oleh Hendi-Ita sebagai petahana dalam membangun Kota Semarang dinilai masyarakat sudah baik dan hal ini menjadikan sikap politik dari partai politik lainnya mendukung dari petahana dalam kontestasi Pilkada Kota Semarang tahun 2020. Keterkaitannya dengan pengaruh hegemoni politik yang terjadi, tidak menjadi suatu hal pertimbangan yang cukup kuat, dikarenakan bila melihat dari komposisi suara parlemen, cukup berimbang mengenai jumlah kursi dari masing-masing partai politik. Walaupun dalam hal ini, Pdi Perjuangan Kota Semarang memiliki 19 kursi dari total 50 kursi yang terdapat di Dprd Kota Semarang, tetapi hal ini tidak menjadikan pengaruh kuat terkait terjadinya hegemoni politik pada penyelenggaraan Pilkada calon tunggal di Kota Semarang.

Kondisi yang berbeda terjadi pada penyelenggaraan Pilkada calon tunggal di Kabupaten Boyolali bila melihat dari segi

perspektif hegemoni politik. Dari pernyataan yang telah disampaikan para informan yang menyatakan terkait adanya hegemoni politik yang terjadi pada fenomena tersebut, diperkuat juga mengenai data sekunder yang didapatkan. Fenomena tersebut melihat dari data lapangan yang dikaji, disebabkan oleh gagalnya pendidikan politik yang terjadi di daerah tersebut. Kegagalan pendidikan politik tersebut, bila dikaitkan dengan praktik hegemoni politik, hal tersebut merupakan salah satu sistem yang sudah dikonsepsikan oleh penguasa guna mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Kekuatan dominasi yang dibangun melalui sistem parlemen, juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh penguasa, dengan memanfaatkan karakteristik pilihan politik dari masyarakat Kabupaten Boyolali yang cenderung pragmatis pada pilihan kepada salah satu partai politik tertentu saja. Kondisi tersebut yang dimanfaatkan oleh penguasa, guna membangun pola kekuatan dominasi melalui sistem parlemen, yang mengakibatkan pada keterbatasan ruang pada lawan politik untuk mengikuti ada kontestasi Pilkada Kabupaten Boyolali tahun 2020 dikarenakan adanya syarat mutlak mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah melalui partai politik.

Pola kekuatan dominasi yang dibangun oleh penguasa dalam upaya mempertahankan kekuasaan yang dimiliki juga terdapat keterkaitannya juga pada pengaruh sistem oligarki politik yang terjadi di daerah setempat. Salah satu bukti terjadinya oligarki politik, dengan terdapatnya peran *local strongman* yang menjadi aktor politik dan non politik di dalam terjadinya fenomena tersebut. Hal ini bila dikaitkan dengan beberapa pernyataan informan, yang menyatakan terdapat peran *local strongmen* pada terjadinya Pilkada calon tunggal di Kabupaten Boyolali. Tokoh kuat di daerah tersebut memiliki relasi politik yang menjadikan dari tokoh tersebut, bisa mengatur terjadinya fenomena tersebut karena kekuatan sumber daya sosial, ekonomi dan politik yang dimilikinya. Tokoh kuat yang dimaksud yaitu Seno Kusumoarjo atau yang akrab disebut Seno Gede, beliau merupakan salah satu sesepuh di Partai Pdi Perjuangan Kabupaten Boyolali dan juga merupakan kakak kandung dari Seno Samodra yang merupakan Bupati Boyolali di periode sebelumnya, Relasi politik yang kuat tersebut disinyalir pada keterkaitannya sebagai aktor di balik layar yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut.

Terkait dari penjelasan yang telah disampaikan mengenai keterkaitan Pilkada

calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali melihat dari segi perspektif hegemoni politik. Terdapat beberapa faktor yang merupakan suatu indikator terjadinya hegemoni politik. Indikator tersebut mengarah pada adanya kelompok dominan yang berpengaruh pada suatu problematika tertentu, kemudian masyarakat secara sadar menerima terkait adanya pengaruh dominasi politik tersebut. Hal lain yang menjadi salah satu bukti kuat terjadinya hegemoni politik yaitu penguasa melakukan praktik dominasi tersebut dengan cara tersistem, dan seolah-olah masyarakat tidak menyadari bahwa praktik tersebut sudah dikonsepsikan oleh penguasa sebagai alat mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Kondisi tersebut terdapat perbedaan terkait Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali bila ditinjau dari segi perspektif hegemoni politik. Terkait aspek-aspek pola hegemoni politik yang telah disampaikan terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Boyolali tahun 2020, yang menjadikan juga faktor kuat terjadinya Pilkada calon tunggal di daerah tersebut. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada Pilkada Kota Semarang dikarenakan, faktor kinerja petahana yang lebih mendominasi dari terjadinya fenomena tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan terkait hegemoni politik Pilkada calon tunggal tahun 2020 di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali, terdapat persamaan dan perbedaan mengenai penyebab terjadinya fenomena tersebut. Persamaan yang menjadi faktor penyebab dari fenomena tersebut yaitu, pengaruh pada faktor kekuatan figur politik yang dimiliki oleh calon kepala daerah, menjadi salah satu pengaruh besar dari elektabilitas maupun popularitas yang dimiliki. Hal ini juga menyebabkan tidak adanya lawan politik karena pengaruh dari figur kandidat kepala daerah tersebut. Kemudian persamaan terakhir, dipengaruhi oleh faktor biaya politik, pengaruh tersebut karena diperlukannya anggaran untuk biaya politik yang cukup mahal dan besar dari lawan politik yang hendak maju dalam kontestasi Pilkada untuk melawan pasangan calon tunggal sehingga persoalan tersebut menjadi suatu penyebab terjadi Pilkada calon tunggal di kedua daerah tersebut.

Mengenai perbedaan yang terjadi pada Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali terletak pada faktor regulasi ambang batas, kemudian juga pada pengaruh karakter pilihan politik oleh

masyarakat dan langkah komunikasi politik yang dilakukan. Ketiga pengaruh tersebut juga yang menjadikan suatu indikator terkait hegemoni politik yang terjadi. Pilkada calon tunggal Kota Semarang terjadi dipengaruhi kuat juga dengan langkah komunikasi politik yang dimanfaatkan oleh petahana untuk merangkul seluruh partai politik, yang memiliki suara di parlemen. Hal tersebut tidak terjadi pada fenomena di Boyolali, dengan adanya regulasi ambang batas terkait pencalonan kepala daerah sangat berpengaruh bagi partai politik yang hendak maju dikarenakan terdapatnya dominasi politik pada parlemen, dikarenakan pada pilihan politik masyarakat Kabupaten Boyolali yang bersifat sosiologis.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah disampaikan pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan hegemoni politik terjadi pada Pilkada Kabupaten Boyolali, dengan keterkaitannya pada kekuatan politik yang dibangun oleh penguasa melalui memanfaatkan karakteristik pilihan politik masyarakat. Sikap politik masyarakat Kabupaten Boyolali yang cenderung bersifat pragmatis, dengan mendukung penuh dari Partai PDI Perjuangan, menyebabkan dominasi yang terjadi pada parlemen, sehingga menyebabkan keterbatasan ruang bagi partai politik lainnya untuk mengikuti

kontestasi Pilkada dikarenakan syarat ambang batas yang diatur. Hal tersebut tidak terjadi pada Pilkada calon tunggal Kota Semarang yang lebih dipengaruhi pada faktor kinerja petahana yang cukup baik sehingga menyebabkan partai politik lainnya tidak mengajukan lawan politik dengan beberapa pertimbangan lainnya.

SARAN

Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi pada penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengajukan saran terkait peningkatan kualitas pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Boyolali. Hal ini bertujuan guna meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terkait pilihan politik yang diambil, sesuai dari calon pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengatasi problematika tersebut. Selain itu, peneliti juga mengajukan saran terkait penguatan kembali dari sistem kualitas kaderisasi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik guna berujung mampu menyeimbangkan dari dinamika politik yang terdapat di Kabupaten Boyolali, agar tidak menciptakan hegemoni kekuasaan oleh salah satu partai politik tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication Inc
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan dan Calon Tunggal dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16–37. h
- Fahriansyah Ori, A. D. S. (2020). Pilkada Calon Tunggal Di Kabupaten Landak Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Politik*, 3(1).
- Fitriyah. (2013). *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*. Deepublish.
- Habibi. (2015). *Implikasi Calon Tunggal Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Kualitas Demokrasi Daerah*.
- Hasrul, H. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Jurnal Renaissance*, 1(1), 17–22.
- Hermanto, J., Purwatiningsih, A., & Rifa'i, M. (2020). Pengaruh Isu, Figur, Rekam Jejak Dan Partai Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019. *Reformasi*, 10(1), 27–33.
- Ishak, N. (2020). Problematika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19(2), 131–143. <https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1144>
- Lestari, A., Ridwan, R., & Rumesten RS, I. (2019). Faktor Penyebab Kehadiran Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Simbur Cahaya*, 25(2), 249–262.
- Nur Hidayat Sardini, F. (2018). The Phenomena of ““An Empty Box”” and the Resistance of Pati People to the Oligarchy Domination in the Local Election Pati. *EDP Sciences*, 1–3.
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi

- Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 047. <https://doi.org/10.31078/jk1913>
- Riky Fajar Sujatmiko¹, T. I. (2022). *Analysis of single candidacy in the grobogan regent election in 2020*. 12(1), 1–11.
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.757>
- Rumesten, I. (2016). Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 72–94.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Faja Mediar Press.
- Siswati, E. (2018). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11–33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>
- Steven Levitsky, D. Z. (2020). *Bagaimana Demokrasi Mati*. Gramedia Pustaka.
- Yunus, N. R. (2018). Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik. *'Adalah*, 1(4), 31–32. <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i4.82>